

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amiruddin. dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram. RajaGrafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinargrafika.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
- C.S.T. Kansil. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- E. Fernando M. Manulang. 2016. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Eddy O.S. 2005. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahay Atma Pustaka.
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Padang: RajaGrafindo Persada.
- Erlis Setiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ermansjah Djaja. 2007. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinargrafika.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta: FHUI dan Papas Sinar sinanti
- M. Solly Lubis,. 2009. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Moh. Hatta. 2014. *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Setia: Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Susilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rismawan Pradiptyo. 2016. *Dampak Sosial Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Roihan A. Rasyid . 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2009. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Pres.
- S.R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum tentara Nasional Indonesia.
- Soejono dan Abdurrahman. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Grafindo.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Taskforce. 2008. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Konsorsium Rerformasi hukum Nasional.
- Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Zainal Asikin,. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Junral

Fence M. Wantu, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19No.3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Fauzan, M. 2017. *Kepastian Hukum Sebagai Upaya Menjamin Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah*. (Makalah disampaikan pada pelatihan dan pembinaan Badan Peradilan Mahkamah Agung RI), Jakarta

Rima Katherina poli, Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi, eJurnal Unsrat vo. V/No.10/Des/2017

Satrio Saptohadi, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di Timor Timur pasca jajak Pendapat*, jurnal Dinamika Hukum vol. 13 No. 2 Mei 2013

Sudiyana; Suswoto, Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018

Internet

“Korupsi Alutsista, Brigjen Teddy Dihukum Seumur Hidup”
<https://nasional.tempo.co/read/824397/korupsi-alutsista-brigjen-teddy-dihukum-seumur-hidup> (diakses pada 8 Februari 2020, pukul 20.46)

“Korupsi Uang Pajak TNI, Pengadilan Militer Vonis Letkol Rahmat 6 Tahun Penjara” <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/06/korupsi-uang-pajak-tni-pengadilan-militer-vonis-letkol-rahmat-6-tahun-penjara> (diakses pada 8 Februari 2020, pukul 21.08)

“Noer Muis Divonis Lima Tahun Penjara”
<https://www.liputan6.com/news/read/51108/noer-muis-divonis-lima-tahun-penjara>, diakses pada 12 Januari 2021

“Pengadilan Militer Vonis Laksma Bambang Udoyo 4,5 Tahun Bui”
<https://kumparan.com/kumparannews/pengadilan-militer-vonis-laksma-bambang-udoyo-4-5-tahun-bui> (diakses pada 8 Februari 2020, pukul 21.16)